

Selayang Pandang Mogok Nasional

Syarat apa yang harus dipenuhi agar sebuah gerakan bisa disebut berskala nasional?

Kita berhasil, kawan!

Sampai saat ini, saya dengan tegas mengatakan bahwa gerakan kaum buruh untuk menghentikan produksi secara bersama-sama pada tanggal 31 Oktober 2013 hingga 1 November 2013 adalah mogok nasional. Jika ada yang menyebut bahwa gerakan itu adalah unjuk rasa nasional (bukan mogok kerja), saya kira itu adalah pendapat yang keliru: ia tidak menghargai realitas yang sebenarnya terjadi.

Hari itu, ratusan pabrik menghentikan produksinya. Jutaan buruh tumpah ruah ke jalan-jalan kawasan industri. Tak hanya terjadi pada satu kabupaten/kota. Tak hanya terjadi pada satu provinsi. Gerakan melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, di akhir Oktober dan awal November itu, terjadi di berbagai daerah padat industri.

Tahun lalu, pada tanggal 28 Oktober 2012, buruh Indonesia juga pernah melakukan hal serupa. Keberhasilan untuk melakukan pemogokan secara nasional ini merupakan capaian yang sangat penting. Di mana untuk yang pertama kalinya, sepanjang sejarah republik ini berdiri, buruh berhasil unjuk kekuatan. Menjadi salah satu elemen masyarakat yang keberadaannya sangat diperhitungkan. Buktinya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjadi salah satu calon kuat penantang Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014. Sebagaimana hasil riset yang dilakukan Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Perlu diketahui, KSPI adalah salah satu konfederasi besar di Indonesia yang menjadi penggerak utama gerakan serikat buruh di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini.

“Kesan yang aku rasakan dalam mogok nasional yang kedua ini, tidak seperti ketika melakukan pemogokan yang pertama,” komentar seorang kawan.

Saya tahu, ada beberapa orang yang memiliki pandangan senada. Saya bisa memakluminya.

Kesan pertama memang selalu memberikan pengalaman yang mendalam. Setidaknya jika dibandingkan dengan pengalaman yang kedua, ketiga, dan berikutnya. Ini hanyalah soal rasa. Namun soal substansi tidaklah berbeda: buruh Indonesia berhasil melakukan mogok nasional. Kali ini, untuk yang kedua kalinya.

Setiap pemogokan yang dilakukan buruh tidak ada yang gagal. Karena dengan pemogokan itulah kaum buruh

merasakan pengalaman paling revolusioner di dalam hidupnya, begitu kata Surya Tjandra, pendiri Trade Union Rights Centre saat menjadi pembicara dalam Sekolah Kepemimpinan yang diselenggarakan FSPMI.

Bukankah setiap orang akan selalu memiliki pengalaman yang berbeda, pada kesempatan dan situasi yang berbeda pula?

Khusus untuk mogok nasional yang kedua ini berhasil dilakukan dengan lebih dahsyat. Juga mendapatkan perlawanan yang jauh lebih hebat.

Mari kita menelusuri kembali jejak yang tertinggal dalam sebuah aksi besar bernama mogok nasional itu.

Dari data yang dimiliki Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB), hari di mana ketika mogok nasional dilakukan, buruh di 15 provinsi dan 150 kabupaten/kota bergerak secara serentak. Hampir 40 kawasan industri lumpuh. Meliputi Jakarta (Pulo Gadung, Sunter, KBN Cakung, Tanjung Priol), 7 (tujuh) kawasan industri di Bekasi, 3 (tiga) kawasan industri di Karawang, 3 (tiga) kawasan industri di Purwakarta, daerah padat industri juga bergerak. Sebut saja Tangerang (Jatake, Cikupa, Balaraja, Tangerang Selatan), Serang, Cilegon, Subang, Bandung, Cimahi, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Karimun, Makasar, Bitung, Gorontalo, Samarinda, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Purbolinggo, Pekalongan, Cilacap, Demak, Semarang, Yogyakarta, dan kota-kota industri lainnya.

Dalam catatan saya, mogok nasional kali ini diikuti tidak kurang dari 2 juta buruh. Beberapa media nasional bahkan ada yang melaporkan pemogokan ini diikuti oleh 3 juta orang

buruh.

Hebatnya, aksi sebesar itu dilakukan di bawah tekanan dan minim dukungan. Tidak semua elite pimpinan serikat buruh di tingkat nasional mendukung aksi pemogokan ini. Kepolisian mulai sering melakukan tindakan represif terhadap aksi-aksi yang dilakukan kaum buruh. Bahkan sebuah diskusi tentang upah di Jawa Tengah yang dilakukan oleh TURC dan serikat buruh dibubarkan secara paksa.

Kita bisa saksikan sendiri, buruh tidak gentar dengan itu semua. Seolah tidak peduli dengan sikap pemimpinnya yang tidak bersedia terlibat di dalam pemogokan (bahkan melarang untuk terlibat dalam pemogokan), tetapi fakta di lapangan menunjukkan lain. Semangat buruh untuk terus berjuang tak bisa dipadamkan hanya karena elite mereka tidak merestui.

Saya mengambil sebuah contoh. Ada salah satu konfederasi serikat pekerja, yang memberikan imbauan secara resmi kepada anggotanya untuk tidak terlibat dalam mogok nasional. Akan tetapi, yang terjadi, imbauan itu diabaikan oleh anggotanya. Di beberapa daerah, anggota dari konfederasi serikat pekerja ini menolak patuh. Mereka tetap bergabung dalam pemogokan, bahkan berdiri di garda depan.

Eskalasi mogok nasional tahun ini juga lebih besar dari mogok nasional tahun lalu. Baik dari sebaran jumlah kabupaten/kota maupun peserta aksi yang terlibat. Beberapa daerah yang tahun lalu tidak bergabung di dalam pemogokan, kali ini mereka menjadi bagian dari mogok nasional. Waktu pelaksanaan mogok kerja pun lebih panjang, hingga 2 (dua) hari.

Gerakan buruh bukanlah gerakan elite, saya kira, inilah pelajaran berharga yang kita dapatkan. Bahwa gerakan serikat buruh, sesungguhnya bersifat *bottom up*. Bukan *top down*. Jika buruh di tingkat bawah sudah berkehendak dan memiliki kesadaran untuk bergerak, tak ada yang bisa menghalang-halangi. Sekalipun elite mereka sendiri. Pada barisan “rumput teki” itulah kekuatan buruh tersembunyi.

Beberapa hari sebelum mogok nasional digelar, sebenarnya buruh sudah mencium adanya gelagat kurang baik dari pihak-pihak yang mencoba menggagalkan pelaksanaan mogok nasional. Dalam sebuah siaran pers yang disampaikan kepada wartawan, Said Iqbal bahkan sudah meminta agar pihak kepolisian, sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki, untuk mengamankan pelaksanaan aksi mogok nasional.

“Mogok nasional yang akan kita lakukan nanti akan berjalan damai, tertib, dan tidak anarkis,” Said Iqbal menegaskan. Meskipun begitu, Presiden FSPMI ini justru mengkhawatirkan adanya preman bayaran yang akan melakukan kekerasan terhadap buruh dalam aksi mogok nasional tersebut.

Dia meminta polisi turun tangan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 telah dengan jelas disebutkan, jika serikat buruh berhak mengorganisir pemogokan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, untuk menyampaikan pendapat di muka umum hanya cukup memberitahukan saja kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini, buruh sudah memberitahukan rencana aksi mogok nasional itu kepada Mabes Polri. Dengan kata lain, mogok nasional yang dilakukan oleh kaum buruh

adalah legal dan sah, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh

Saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana mogok nasional itu dipersiapkan.

Hari itu tanggal 30 September 2013.

Itu akan menjadi kenangan yang tak mungkin bisa saya lupakan. Saya tergetar setiap kali mengingatnya. Ketika mendengarkan kembali setiap orasi yang disampaikan oleh pemimpin kami. Apalagi ketika persatuan kembali dideklarasikan.

Saya sudah sering menghadiri acara seperti ini. Tetapi untuk kali ini, saya melihat wajah-wajah tulus. Wajah yang tulus dan ikhlas dalam perjuangan.

Saat itu, aktivis dari berbagai serikat buruh dari berbagai daerah berkumpul di Gedung Joang, Jl. Menteng Raya 31, Jakarta.

Tujuan pertemuan di Gedung Joang ini adalah untuk mengkonsolidasikan gerakan buruh di Indonesia terkait dengan perjuangan upah minimum, *outsourcing*, dan jaminan sosial. Senang rasanya bisa melihat kesadaran untuk berjuang secara bersama-sama terus tumbuh dan berkembang. Mereka sepakat untuk tidak terkotak-kotak dalam perbedaan bendera. Mereka sepakat untuk berlomba-lomba berada di garda depan perjuangan. Mereka sepakat untuk tidak menjadi pecundang: apalagi berkolaborasi dengan ‘pengusaha hitam’ dengan mendukung upah murah di negara yang pernah dijuluki zamrud khatulistiwa ini.

Kelak, para aktivis yang hadir dalam pertemuan Gedung Joang sepakat untuk menamakan gerakan ini sebagai Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB).

KNGB sekaligus menandai kelahiran aliansi di tingkat nasional, dengan jangkauan yang lebih luas. Baik dari segi sebaran wilayah maupun serikat buruh yang bergabung. Aliansi ini tidak elitis. Dan yang lebih penting, KNGB bekerja di tingkat ‘akar rumput’ melalui aliansi-aliansi daerah yang tersebar di berbagai kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam pertemuan Gedung Joang itu, KNGB juga mengumumkan secara terbuka: mogok nasional pada tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2013. Di dalam perkembangannya, puncak mogok nasional dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2013 dan 1 November 2013. Akan tetapi pemanasan mogok nasional tetap dilakukan mulai tanggal 28 Oktober 2013.

Saya masih terbayang-bayang dengan hari itu. Hari ketika saya mengetahui secara resmi mogok nasional akan dilakukan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2013. Banyak buruh yang menyambutnya dengan suka cita. Kami bersorak-sorai. Pekik “hidup buruh” menggema berkali-kali. Menggetarkan jiwa.

Kami bergembira. Sungguh, kami bergembira. Rasanya seperti baru menang lotre saja.

Mogok adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan jati diri. Karena buruhlah pabrik-pabrik bisa berproduksi. Dan jika buruh satu hati mematikan mesin, maka dengan serta produksi akan terhenti. Pada titik inilah semua mata akan menyadari, betapa sesungguhnya keberadaan kaum buruh